

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI RIAU



RENCANA KERJA TAHUN 2016
(R K T)



TAHUN ANGGARAN
2016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	2
B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	5
B.3. Keadaan Pegawai	5
B.4. Kondisi Sarana dan Prasarana	9
C. Landasan Hukum.....	12
D. Maksud dan Tujuan	14
BAB II : RENCANA STRATEGI	15
A. Rencana Strategik	15
A. 1. Visi dan Misi	15
A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strateegi Kebijakan	17
A.2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator	17
A.2.2. Strategi	18
A.2.3. Kebijakan	20
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	24
A. Indikator Kinerja Utama	24
B. Program dan Kegiatan	26
C. Alokasi Anggaran.....	42
BAB IV. : PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Gambar Struktur Organisasi	4
Tabel 1. 2.	Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015 Berdasarkan Janis Kelamin	6
Tabel 1. 3.	Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1. 4.	Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau tahun 2015 Berdasarkan Janis Kelamin	7
Tabel 1. 5.	Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau tahun 2015	9
Tabel 2. 1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator BKP2D Tahun 2016	17
Tabel 3. 1.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	24
Tabel 3. 2.	Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2016	42
Tabel 3. 3.	Realisasi Keuangan Belanja langsung BKP2D Provinsi Riau tahun 2016.....	42



KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

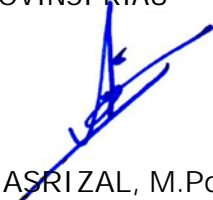
Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain perencanaan strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

Pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang diserahkan tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan azas Aparatur Sipil Negara secara konsisten terus menegakan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap peran dan tugas.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang professional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi Permerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat obyektif dan wajar.

Laporan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2016 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternative pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU



Drs. ASRI ZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1001

RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2016

Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKP2D Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2016 terdapat 9 (Sembilan) program dengan 140 (seratus empat puluh) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
(13 Kegiatan)
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 11) Penyediaan jasa keamanan kantor;
 - 12) Pameran pembangunan provinsi Riau (Riau Expo);
 - 13) Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinisi Riau.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(4 kegiatan)
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 2) Pemeliharaan Rutin.Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(9 kegiatan)
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - 3) Pembinaan fisik dan mental aparatur;

- 4) Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
 - 5) Pemantauan disiplin PNS;
 - 6) Penanganan kasus-kasus kepegawaian;
 - 7) Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN;
 - 8) Training motivasi Aparatur Sipil Negara;
 - 9) Pengelolaan (LHKPAN) pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (23 Kegiatan)
- 1) Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaisawara;
 - 2) Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
 - 3) Diklat TOT Widyaisawara;
 - 4) Diklat Training Officer Course (TOC);
 - 5) Diklat Management of training (MOT);
 - 6) Diklat teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
 - 7) Diklat analisis kebutuhan diklat;
 - 8) Diklat analisa jabatan dan beban kerja;
 - 9) Diklat teknis penilaian Aset Milik Negara/Daerah;
 - 10) Diklat teknis administrasi kearsipan;
 - 11) Diklat teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas;
 - 12) Diklat Teknis administrasi kepegawaian;
 - 13) Diklat teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - 14) Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi;
 - 15) Diklat Penata usahaan keuangan daerah;
 - 16) Diklat bendahara keuangan daerah;
 - 17) Diklat pengelolaan aset daerah;
 - 18) Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance;
 - 19) Diklat Pengembangan e-government;
 - 20) Diklat perencanaan tingkat dasar;
 - 21) Diklat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 22) Diklat bahasa inggris (TOEFL);
 - 23) Diklat Pengembangan Potensi Akademik.
 - 24) Diklat Luar Negeri;
 - 25) Diklat membangun program inofatif;
 - 26) Diklat membangun kecerdasan bersaing;

- 27) Diklat implementasi knowledge management;
 - 28) Diklat membangun kemitraan;
 - 29) Diklat membangun keunggulan kompetitif daerah;
 - 30) Diklat kepemimpinan global;
 - 31) Diklat entrepreneurial government;
 - 32) Diklat membangun budaya anti korupsi;
 - 33) Diklat tenaga pengelola teknis;
 - 34) Diklat creative problem solving;
 - 35) Diklat penyusunan karya tulis ilmiah;
 - 36) Diklat teknis fungsional widyaiswara Provinsi Riau;
 - 37) Diklat teknis ke widyaiswaraan berjenjang;
 - 38) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Perencana Aparatur;
 - 39) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Analisis Kepegawaian;
 - 40) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Peneliti;
 - 41) Orasi Ilmiah Widyaiswara;
 - 42) Seleksi asesor Provinsi Riau;
 - 43) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas asesor Provinsi Riau.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(8 Kegiatan)
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 - 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - 5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 6) Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 7) Pelaporan barang milik daerah;
 - 8) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
6. Program Pendidikan Kedinasan
(8 kegiatan)
- 1) Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I);
 - 3) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II);
 - 4) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III);

- 5) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV);
 - 6) Seleksi Diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)
 - 7) Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III
 - 8) Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
(36 kegiatan)
- 1) Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - 2) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
 - 3) Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau berbasis analisa jabatan dan beban kerja;
 - 4) Satya lencana karya satya;
 - 5) Monitoring dan evaluasi tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau;
 - 6) Bimtek pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - 7) Bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS Provinsi Riau;
 - 8) Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur sipil negara Provinsi Riau;
 - 9) Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur sipil negara Provinsi Riau;
 - 10) Sosialisasi petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bagi PNS Provinsi Riau;
 - 11) Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara;
 - 12) Workshop kegiatan bagi PPTK;
 - 13) Pendidikan, pelatihan, kursus dan Bintek Pegawai BKD;
 - 14) Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur BKD;
 - 15) Assesment Center Provinsi Riau;
 - 16) Peningkatan sumber daya aparatur dengan emotional spritual quotient trainiing;
 - 17) Monitoring IPDN;
 - 18) Monitoring dan evaluasi kediklatan aparatur sipil negara;
 - 19) Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional PNS Provinsi Riau;
 - 20) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PP 46 tahun 2011;
 - 21) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau;
 - 22) Pengadaan aparatur sipil negara;
 - 23) Seleksi Penerimaan IPDN;

- 24) Pengelolaan ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - 25) Rakor widyaiswara;
 - 26) Penyusunan analisis kebutuhan diklat;
 - 27) Pengadaan E Government manajemen kepegawaian Provinsi Riau;
 - 28) Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document);
 - 29) Koordinasi pemantauan disiplin aparatur se Provinsi Riau;
 - 30) Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran responsif Gender;
 - 31) Bimbingan teknis manajemen pengembangan karir PNS Provinsi Riau;
 - 32) Bimbingan teknis Perka BKN No. 18 tahun 2011 tentang pengelolaan tata naskah dinas;
 - 33) Penyusunan dan pembinaan karier aparatur sipil negara;
 - 34) Monitoring, evaluasi program dan kegiatan;
 - 35) Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat tinggi pratama Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
 - 36) Pengadaan Modul Pembelajaran.
8. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
(15 kegiatan)
- 1) Pengelolaan Administrasi pindah tugas PNS;
 - 2) Pengelolaan kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau;
 - 3) Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau;
 - 4) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan fungsional tertentu;
 - 5) Pengelolaan administrasi izin belajar;
 - 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 7) Pengelolaan kartu pegawai elektronik;
 - 8) Penyusunan formasi PNS Provinsi Riau;
 - 9) Pengelolaan HUMAS BKP2D Provinsi Riau;
 - 10) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - 11) Pengelolaan administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Riau;
 - 12) Pengelolaan data kepegawaian;
 - 13) Penyelenggaraan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau;

- 14) Pengelolaan website BKP2D Provinsi Riau;
 - 15) Penysunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik.
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
(4 kegiatan)
- 1) Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti;
 - 2) Pelatihan berwiraswasta kepada PNS;
 - 3) Pengelolaan pensiun PNS;
 - 4) Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur sipil negara Provinsi Riau.

Pekanbaru, 2016
**Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Provinsi Riau**

Drs. ASRIZAL, M.PD
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang sumber daya aparatur daerah Riau. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian serta ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan perencanaan dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan dinamis. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dan mensukseskan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Laporan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2016 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan permasalahan yang dihadapi beserta solusi maupun alternatif pemecahan masalah tersebut. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan kepegawaian dimasa yang akan datang.

B. Gambaran Umum

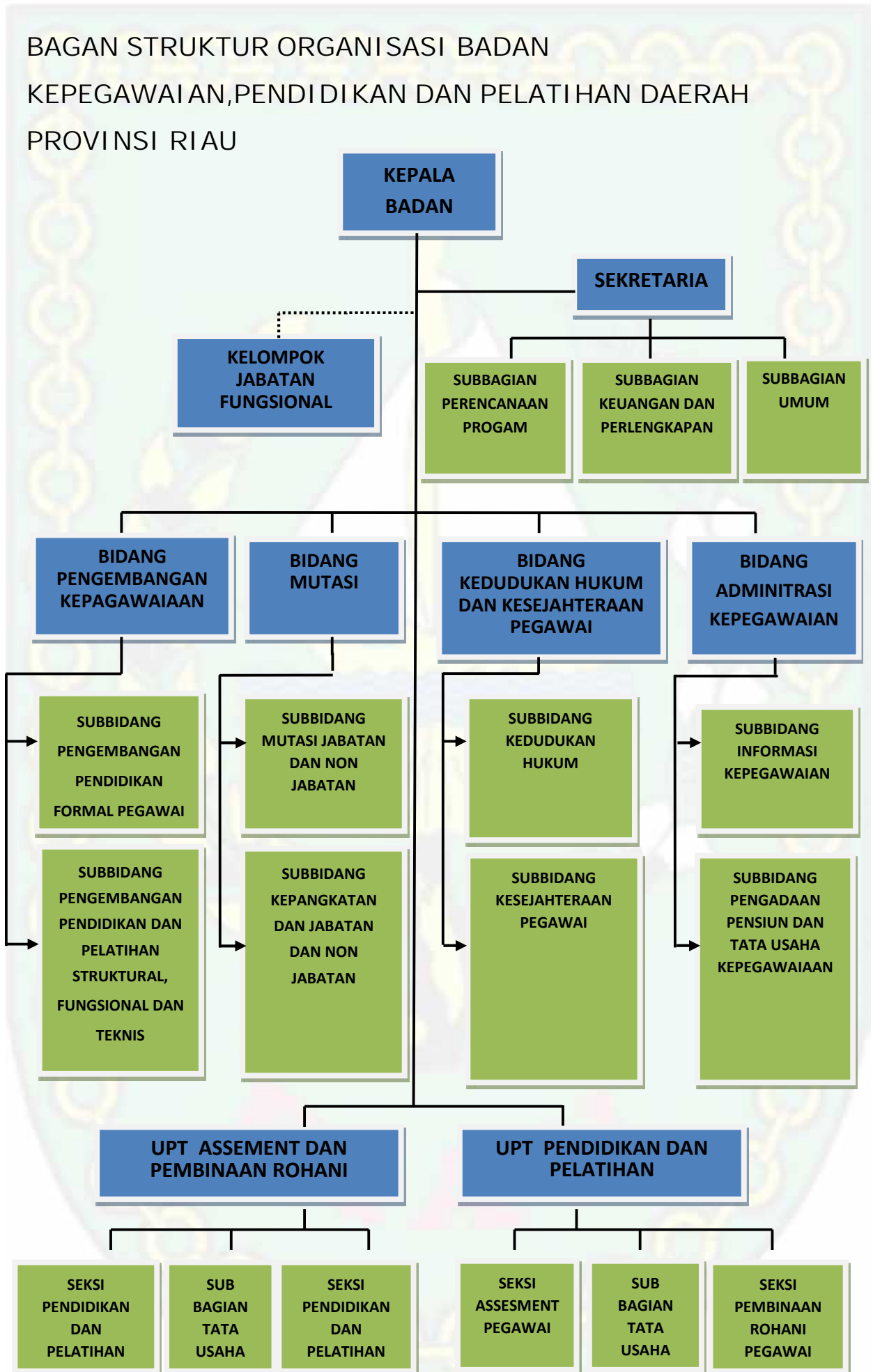
B. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, serta uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan Perda dan Pergub diatassusunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Pegawai :
 - a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 - b. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.
4. Bidang Mutasi :
 - a. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - b. Subbidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.

5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai :
 - a. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Administrasi Kepegawaian :
 - a. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian.
7. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis.
8. UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Assesment;
 - c. Seksi Pembinaan Rohani Pegawai.

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi



B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Sesuai dengan tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKP2D Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKP2D Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2015 sebanyak 164 orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
105	59	164

Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya jenis kelamin laki-laki sebanyak 105 orang (65%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (35%). Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Ket	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Per Jenis Kelamin	4	-	31	12	54	41	15	7
Sub.Total	4		43		95		22	
Total	164							

Sedangkan data berdasarkan golongan dan jenis kelamin terdapat golongan I laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan tidak ada, golongan II laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 12 orang, golongan III laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan 41 orang dan golongan IV laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau dibawah ini :

Tabel 1.4. Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KepalaBadan	1		1
2	Sekretaris Badan	1		1
3	KepalaBidang Pengembangan Pegawai	1		1
4	Kepala Bidang Bidang Mutasi	1		1
5	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra	1		1
6	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian		1	1
7	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
8	Kepala UPT Assesment dan Pembinaan Rohai Pegawai	1		1
9	Kepala Subbag Perencanaan Program	1		1
10	Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan		1	1
11	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian		1	1
12	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai	1		1
13	Kepala SubbidangPengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis		1	1
14	Kepala Subbid MutasiJabatan dan Non Jabatan	1		1

15	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan		1	1
16	Kepala Subbid Kedudukan Hukum		1	1
17	Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai		1	1
18	Kepala Subbid Informasi Pegawai		1	1
19	Kepala Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian		1	1
20	Kepala Seksi Tata Usaha UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		1	1
21	Kepala Seksi Pelatihan Struktural UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
22	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional UPT Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1		1
23	Kepala Seksi Tata Usaha UPT Assesment dan Pembina Rohani Pegawai		1	1
24	Kepala Seksi Assesment UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai	1		1
25	Kepala Seksi Pembinaan dan Rohani UPT Assesment dan Pembinaan Rohani Pegawai			
26	Jabatan Fungsional			
	Widyaiswara	16	2	18

	Arsiparis	1		1
	Auditor Kepegawaian	2	2	4
	Analisis Kepegawaian		2	2
	Perencanaan	1		1
27	Pelaksana/Fungsional Umum	72	42	114
TOTAL		105	59	164

B. 4. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau Tahun 2015

A.	Tanah dan Bangunan			
1	Luas tanah gedung kantor BKP2D	:	3.212	M ²
2	Luas tanah kantor UPT Diklat jalan Ronggo Warsito	:	13.880	M ²
3	Luas tanah UPT Diklat Pasir Putih	:	149.410	M ²
B.	Alat-Alat Angkutan			
1	Kendaraan bermotor:			
	- Roda empat	:	8	unit
	- Roda dua	:	3	unit
2	Mesin ketik manual standar	:	2	unit

3	Mesin ketik elektronik	:	1	unit
4	Mesin fotocopy dengan kertas folio	:	2	unit
5	Lemari besi	:	1	unit
6	Rak besi/metal	:	5	unit
7	Rak kayu	:	6	unit
8	Filling besi/metal	:	4	unit
9	Rotary filling	:	1	unit
10	Lemari kayu	:	9	unit
11	Papan pengumuman	:	1	unit
12	White board	:	2	unit
13	Alat pemotong kertas	:	1	unit
14	Alat kantor lainnya	:	7	unit
15	Lemari kayu	:	3	unit
16	Meja kayu/rotan	:	13	unit
17	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	:	1	unit
18	Tempat tidur kayu (lengkap)	:	200	Unit
19	Meja rapat	:	36	unit
20	Meja makan	:	10	unit
21	Meja panjang	:	1	unit
22	Kursi rapat	:	157	unit
23	Kursi tamu	:	1	unit
24	Kursi tangan	:	1	unit
25	Kursi putar	:	3	unit
26	Kursi biasa	:	1	unit
27	Bangku tunggu	:	1	unit
28	Meja Komputer	:	51	unit
29	Kasur	:	100	unit
30	Bantal	:	100	unit
31	Sprei	:	100	unit
32	Sofa	:	7	unit
33	Lemari Pakaian	:	16	Unit
34	Mesin penghisap debu	:	2	unit
35	Lemari es	:	1	unit
36	AC unit	:	54	unit
37	AC split	:	9	unit
38	Kipas angin	:	100	unit
39	Sound System	:	1	unit
40	Wireless	:	1	unit
41	Unit Power Supply	:	59	unit
42	Stabilisator	:	2	unit
43	Camera Video	:	1	unit
44	Dispenser	:	17	unit
45	Alat rumah tangga lain-lain	:	202	unit
46	Gorden	:	2	unit
47	Alat pemadam portable	:	2	unit
48	PC unit	:	151	unit
49	Laptop	:	7	unit
50	Note book	:	37	unit
51	Hard disk	:	1	unit

52	Scanner	:	5	Unit
53	Monitor	:	50	unit
54	Printer	:	91	unit
55	Server	:	2	unit
56	Peralatan personal komputer lain-lain	:	11	unit
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	:	2	unit
58	Meja kerja pegawai non struktural	:	1	unit
59	Meja kerja pejabat lain-lain	:	11	unit
60	Meja Rapat Pejabat eselon II	:	1	Unit
61	Meja rapat pejabat eselon III	:	3	unit
62	Meja rapat pejabat lain-lain	:	5	unit
63	Kursi kerja pejabat eselon II	:	1	unit
64	Kursi kerja pejabat eselon III	:	3	unit
65	Kursi kerja pegawai non struktural	:	100	unit
66	Kursi kerja pejabat lain-lain	:	22	unit
67	Kursi rapat pejabat eselon III	:	1	Unit
68	Kursi tamu diruangan pejabat lain-lain	:	50	unit
C.	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
1	Camera + attachment	:	2	unit
2	Proyektor + attachment	:	17	unit
3	Microphone/wireless mic	:	12	unit
4	Unit Power Supply (UPS)	:	1	unit
5	Peralatan studio visual lain-lain	:	5	unit
6	Breket LCD/TV	:	13	unit
7	Handy cam	:	3	unit
8	Infocus	:	3	unit
9	Peralatan studio video dan film lain-lain	:	2	unit
10	Camera electronic	:	3	unit
11	Video monitor	:	1	unit
12	Tripod camera	:	2	unit
13	Layar film	:	1	unit
14	Sound system	:	4	unit
15	Telephone (PABX)	:	1	unit
16	Pesawat telephone	:	20	unit
17	Alat komunikasi lain-lain	:	27	unit
18	Wireless amplifier	:	1	unit
D.	Alat Laboratorium			
1	Personal komputer	:	2	unit
2	Alat laboratorium lainnya	:	20	unit
3	Alat laboratorium penunjang lainnya	:	8	unit
4	Software cont off-line computer	:	2	unit
5	Alat Keamana Lain-lain	:	1	unit
E.	Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	:	6	unit
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	:	2	unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	:	4	unit
4	Bangunan Gudang Lain-lain	:	3	unit
5	Gedung Pos jaga Permanen	:	1	unit
6	Bangunan Menara/pagar	:	1	unit

7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	:	2	unit
8	Asrama Permanen	:	5	unit
9	Bangunan Pengambilan Air Bersih dan lain-lain	:	1	unit
10	Bangunan Penampung Air Baku	:	1	unit
11	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain	:	1	unit
F.	Lain-lain			
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas sedang	:	2	unit
2	Instalasi Gardu Listrik Induk lain-lain	:	1	unit
3	Instalasi Gardu Listrik distribusi lain-lain	:	2	unit
4	Jaringan LAN/WAN/Internet	:	10	unit
5	Buku Umum lain-lain	:	1	buah
6	Lukisan lain-lain	:	1	buah
7	Alat Voley	:	12	buah
8	Alat Tenis Meja	:	5	buah
9	Alat Badminton	:	13	buah
10	Alat Olahraga lain-lain	:	4	buah
11	Kontruksi dalam Pengerjaan	:	1	unit

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2018.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahunan Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2016 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawain Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan kepegawain Daerah provinsi Riau,
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan kepegawain Daerah provinsi Riau,
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawain Daerah provinsi Riau dimasa yang akan datang,
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan kepegawain Daerah provinsi Riau dimata instansi pemerintah lainnya,
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.

BAB II

RENCANA STRATEGI

A. Rencana Strategik

A. 1. Visi dan Misi

Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu perumusan visidan misi perlu dilakukan secara seksama dengan melibatkan berbagai stakeholders yang terkait dengan tupoksi. Secara konseptual, Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan maupun mimpi. Visi merupakan tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai. Selain itu juga bagaimana cara mencapainya.

Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

“Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju visi Riau 2025”

Makna yang terkandung dalam visi:

- a. Pusat pembangunan adalah pusat pembangunan aparatur sipil negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur Sipil negara yang berdasarkan azas ASN;

- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi birokrasi yang bersih dan melayani.

Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah :

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur sipil negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. Membangun aparatur sipil Negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen apartur sipil negara yang berlandaskan azas ASN adalah membangun aparatur sipil negara sebagai profesi yang didasari atas nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral dan bertanggung jawab pada pelayanan publik berdasarkan kualifikasi akademik serta kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- b. Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas,

keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif, efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.

A. 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator, Strategi dan Kebijakan Tujuan

B. 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai secara tahunan selama periode Renstra tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BKP2D Tahun 2016

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN	1.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi
		1.2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.2.1. Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.3.1. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan
		1.4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.4.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan
		1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.5.1. Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	2.1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi 2.2 Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	2.1.1. Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara 2.2.1. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara

A. 2. 2. Strategi

- 1) Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi;

- 2) Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
- 3) Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara;
- 4) Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru;
- 5) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui :
 - a. Tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja dan indeks harga yang berlaku;
 - b. Memberikan fasilitas kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - d. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara.
- 6) Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
- 7) Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

A. 2. 3. Kebijakan

Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau untuk mendukung terlaksananya misi serta strategi yang ada adalah sebagai berikut:

Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi.

Kebijakan :

- a. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang menunjang perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara bersertifikasi;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas asesor melalui kerja praktek dan pelatihan untuk menghasilkan asesor yang bersertifikasi dengan standarisasi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara.

Kebijakan :

- a. Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi;
- b. Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil negara;
- c. Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;

- d. Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja aparatur sipil Negara.

Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara.

Kebijakan:

Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru.

Kebijakan :

Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa dan penerapan pola pendidikan baru bagi pelatihan kepemimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

Kebijakan :

- a. Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku;
- b. Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- d. Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

Kebijakan :

- a. Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- b. Penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizzing) dengan pemetaan (Mapping);
- c. Penerapan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
- d. Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS;
- e. Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian;
- f. Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- g. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara.

Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan Pusat assesment center dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan :

- a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis E-Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
- b. Membangun UPT Asessment untuk pengembangan dan pelaksanaan

asesmnet center provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan asesment;

- c. Menjadikan UPT Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan fasilitas prasarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan standar diklat terakreditasi berbasis modern dengan sistem informasi dan teknologi.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk pedoman atau arahan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan). Indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 sebagai berikut ini :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi
Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	1.1.1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%
	1.2. Peningkatan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	1.1.2. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	20%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.3. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	1.3.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	401 orang
	1.4. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	1.4.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi	85%
	1.5 Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	1.5.1 Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara yang mendapat teguran/sanksi	15%
	1.6 Peningkatan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi	1.6.1 Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi Aparatur Sipil 1.6.2 Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang meningkat	84% 10%
	1.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima ,efesien dan efektif	1.7.1 Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara 1.7.2 Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	20% 48%

B. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKP2D Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2016 terdapat 9 (Sembilan) program dengan 140 (seratus empat puluh) kegiatanyaitu :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran(13 Kegiatan)
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 11) Penyediaan jasa keamanan kantor;
 - 12) Pameran pembangunan provinsi Riau (Riau Expo);
 - 13) Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinisi Riau.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(4 kegiatan)
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 2) Pemeliharaan Rutin.Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur(9 kegiatan)

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- 3) Pembinaan fisik dan mental aparatur;
- 4) Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- 5) Pemantauan disiplin PNS;
- 6) Penanganan kasus-kasus kepegawaian;
- 7) Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN;
- 8) Training motivasi Aparatur Sipil Negara;
- 9) Pengelolaan (LHKPAN) pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (23 Kegiatan)

- 1) Diklat Kompetensi dan Pengembangan Widyaisawara;
- 2) Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- 3) Diklat TOT Widyaisawara;
- 4) Diklat Training Officer Course (TOC);
- 5) Diklat Management of training (MOT);
- 6) Diklat teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- 7) Diklat analisis kebutuhan diklat;
- 8) Diklat analisa jabatan dan beban kerja;
- 9) Diklat teknis penilaian Aset Milik Negara/Daerah;
- 10) Diklat teknis administrasi kearsipan;
- 11) Diklat teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas;
- 12) Diklat Teknis administrasi kepegawaian;
- 13) Diklat teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 14) Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi;
- 15) Diklat Penata usahaan keuangan daerah;

- 16) Diklat bendahara keuangan daerah;
- 17) Diklat pengelolaan aset daerah;
- 18) Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance;
- 19) Diklat Pengembangan e-government;
- 20) Diklat perencanaan tingkat dasar;
- 21) Diklat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 22) Diklat bahasa inggris (TOEFL);
- 23) Diklat Pengembangan Potensi Akademik.
- 24) Diklat Luar Negeri;
- 25) Diklat membangun program inofatif;
- 26) Diklat membangun kecerdasan bersaing;
- 27) Diklat implementasi knowledge management;
- 28) Diklat membangun kemitraan;
- 29) Diklat membangun keunggulan kompetitif daerah;
- 30) Diklat kepemimpinan global;
- 31) Diklat entrepreneurial government;
- 32) Diklat membangun budaya anti korupsi;
- 33) Diklat tenaga pengelola teknis;
- 34) Diklat creative problem solving;
- 35) Diklat penyusunan karya tulis ilmiah;
- 36) Diklat teknis fungsional widyaiswara Provinsi Riau;
- 37) Diklat teknis ke widyaiswaraan berjenjang;
- 38) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Perencana Aparatur;
- 39) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Analisis Kepegawaian;
- 40) Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, Peneliti;

- 41) Orasi Ilmiah Widyaisawara;
 - 42) Seleksi asesor Provinsi Riau;
 - 43) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas asesor Provinsi Riau.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(8 Kegiatan)
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
 - 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - 5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 6) Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 7) Pelaporan barang milik daerah;
 - 8) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
 6. Program Pendidikan Kedinasan(8 kegiatan)
 - 1) Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I);
 - 3) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II);
 - 4) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III);
 - 5) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV);
 - 6) Seleksi Diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)
 - 7) Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III
 - 8) Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur(36 kegiatan)
- 1) Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - 2) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
 - 3) Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau berbasis analisa jabatan dan beban kerja;
 - 4) Satya lencana karya satya;
 - 5) Monitoring dan evaluasi tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau;
 - 6) Bimtek pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - 7) Bimtek penyusunan formasi pengadaan PNS Provinsi Riau;
 - 8) Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur sipil negara Provinsi Riau;
 - 9) Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur sipil negara Provinsi Riau;
 - 10) Sosialisasi petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional bagi PNS Provinsi Riau;
 - 11) Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara;
 - 12) Workshop kegiatan bagi PPTK;
 - 13) Pendidikan, pelatihan, kursus dan Bintek Pegawai BKD;
 - 14) Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur BKD;
 - 15) Assesment Center Provinsi Riau;
 - 16) Peningkatan sumber daya aparatur dengan emotional spritual quotient trainiing;
 - 17) Monitoring IPDN;
 - 18) Monitoring dan evaluasi kediklatan aparatur sipil negara;
 - 19) Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional PNS Provinsi Riau;
 - 20) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PP 46 tahun 2011;

- 21) Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau;
 - 22) Pengadaan aparatur sipil negara;
 - 23) Seleksi Penerimaan IPDN;
 - 24) Pengelolaan ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - 25) Rakor widyaiswara;
 - 26) Penyusunan analisis kebutuhan diklat;
 - 27) Pengadaan E Government manajemen kepegawaian Provinsi Riau;
 - 28) Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document);
 - 29) Koordinasi pemantauan disiplin aparatur se Provinsi Riau;
 - 30) Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran responsif Gender;
 - 31) Bimbingan teknis manajemen pengembangan karir PNS Provinsi Riau;
 - 32) Bimbingan teknis Perka BKN No. 18 tahun 2011 tentang pengelolaan tata naskah dinas;
 - 33) Penyusunan dan pembinaan karier aparatur sipil negara;
 - 34) Monitoring, evaluasi program dan kegiatan;
 - 35) Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat tinggi pratama Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
 - 36) Pengadaan Modul Pembelajaran.
8. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara(15kegiatan)
- 1) Pengelolaan Administrasi pindah tugas PNS;
 - 2) Pengelolaan kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau;

- 3) Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau;
 - 4) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan fungsional tertentu;
 - 5) Pengelolaan administrasi izin belajar;
 - 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 7) Pengelolaan kartu pegawai elektronik;
 - 8) Penyusunan formasi PNS Provinsi Riau;
 - 9) Pengelolaan HUMAS BKP2D Provinsi Riau;
 - 10) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - 11) Pengelolaan administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Riau;
 - 12) Pengelolaan data kepegawaian;
 - 13) Penyelenggaraan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau;
 - 14) Pengelolaan website BKP2D Provinsi Riau;
 - 15) Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik.
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur (4 kegiatan)
- 1) Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti;
 - 2) Pelatihan berwiraswasta kepada PNS;
 - 3) Pengelolaan pensiun PNS;
 - 4) Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur sipil negara Provinsi Riau.

Tabel 3.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1.1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		7%	7,863,227,553.00
				1 Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara	22 orang / 6 hari	443,382,353.00
				2 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	15 Orang	347,424,000.00
				3 Diklat TOT Widyaiswara	30 orang / 10 hari	146,201,000.00
				4 Diklat Training Officer Course (TOC)	30 orang / 10 hari	212,702,500.00
				5 Diklat Management Of Training (MOT)	30 orang / 10 hari	211,678,000.00
				6 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	10 Orang	239,510,000.00
				7 Diklat Analisis Kebutuhan Diklat	60 orang / 6 hari	241,929,000.00
				8 Diklat Analisa Jabatan Dan Beban Kerja	60 orang / 8 hari	301,500,000.00
				9 Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara Daerah	60 orang / 6 hari	193,734,000.00
				10 Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	30 orang / 7 hari	171,331,000.00
				11 Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	30 orang / 6 hari	100,500,000.00
				12 Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	30 orang / 6 hari	100,500,000.00
				13 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	30 orang / 6 hari	100,500,000.00
				14 Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi	30 orang / 8 hari	150,750,000.00
				15 Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah	30 orang / 6 hari	150,750,000.00
				16 Diklat Bendahara Keuangan Daerah	30 orang / 15 hari	145,108,000.00
				17 Diklat Pengelolaan Aset Daerah	60 orang / 6 hari	193,734,000.00
				18 Diklat Teknis Pelayanan Publik Yang Prima Dan Berwawasan Good	30 orang / 7 hari	188,194,000.00
				19 Diklat Pengembangan E-government	30 org / 7 hari	131,097,000.00
				20 Diklat Perencanaan Tingkat Dasar	30 orang / 6 hari	150,750,000.00
				21 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	30 orang / 6 hari	150,750,000.00
				22 Diklat Bahasa Inggris (TOEFL)	20 orang	171,205,600.00
				23 Diklat Pengembangan Potensi Akademik	20 orang	1,000,000.00
				24 Diklat Luar Negeri	14 Orang	329,816,000.00

25	Diklat Membangun Program Inofatif	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
26	Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
27	Diklat Implementasi Knowledge Management	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
28	Diklat Membangun Kemitraan	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
29	Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
30	Diklat Kepemimpinan Global	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
31	Diklat Entrepreneurial Government	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
32	Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi	30 orang / 5 hari	100,500,000.00
33	Diklat Tenaga Pengelola Teknis	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
34	Diklat Creative Problem Solving	30 orang / 5 hari	1,000,000.00
35	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	30 orang / 5 hari	100,500,000.00
36	Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau	16 orang / 6 hari	282,013,050.00
37	Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang	13 orang / 14 hari	282,013,050.00
38	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur	20 Orang	727,280,000.00
39	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian	20 orang / 14 hari	233,244,000.00
40	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti	20 Orang	593,500,000.00
41	Orasi Ilmiah Widyaiswara	1 orang	193,000,000.00
42	Seleksi Asesor Provinsi Riau	51 Orang	315,881,000.00
43	Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau	15 Orang	452,250,000.00

2	1.2 Peningkatan Disiplin Aparatur Negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15%	1,686,730,938.00	
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	210 orang	132,132,200.00
				2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	210 orang	120,000,000.00
				3 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	1 set net pingpong, 4 buah bet pingpong, 18 kotak bola pingpong, 1 unit meja pingpong, latihan futsal 60 jkb, 12 stel pakaian olahraga futsal, 12 stel pakaian olahrag volley, 2 orang instruktur senam sehat 11 bulan, ceramah agama bulan ramadhan	162,105,294.00
				4 Pelaksanaan SumpahJanji PNS	200 Orang	87,208,065.00
				5 Pemantauan Disiplin PNS	1 dokumen, Provinsi, 12 kabupaten/kota	420,701,040.00
				6 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	60 Orang	145,029,339.00
				7 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN	100 orang	284,625,000.00
				8 Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	50 orang	192,960,000.00
				9 Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	7912 Orang	141,970,000.00
3	1.3 Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	12,405,138,112.00	
				1 Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	2 modul	85,166,063.00
				2 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	18 orang	874,676,625.00
				3 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa	1 Dokumen	541,200,000.00
				4 Satya Lencana Karya Satya	350 Orang	214,499,667.00
				5 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau	3 Dokumen 12 Kabupaten kota	80,400,000.00
				6 Bimtek Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	43 Orang	1,000,000.00
				7 Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	1 kegiatan	1,000,000.00
				8 Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi	90 Orang	90,450,000.00

9	Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi Bagi Aparatur Pemerintah	90 Orang	1,000,000.00
10	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bagi PNS Provinsi	60 Orang	1,000,000.00
11	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	150 Orang	90,611,688.00
12	Workshop Kegiatan Bagi PPTK	120 orang / 2 hari	90,450,000.00
13	Pendidikan, Pelatihan, Kursus Dan Bintek Pegawai BKD	100%	431,200,000.00
14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	100%	409,523,000.00
15	Assessment Center Provinsi Riau	1202 orang	4,465,488,200.00
16	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dengan Emotional Spiritual Quotient	33 Orang	90,450,000.00
17	Monitoring IPDN	1 Dokumen Laporan	242,564,000.00
18	Monitoring Dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	113,300,000.00
19	Monitoring Dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	1 Dokumen, 12 Kabupaten Kota	1,000,000.00
20	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1 Kegiatan	134,083,000.00
21	Koordinasi Dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG Di Pemerintah	1 dokumen; Kabupaten/Kota se-Povinsi Riau dan instansi teknis pembina	145,701,693.00
22	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	10000 orang/berkas	1,239,657,000.00
23	Seleksi Penerimaan IPDN	Sesuai Kuota	267,150,000.00
24	Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	100 %	263,150,000.00
25	Rakor Widya Iswara	1 Dokumen, 12 Kabupaten/Kota	162,870,000.00
26	Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	52 Dokumen	251,200,000.00
27	Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1 paket aplikasi e-gov berbasis web dan perangkat pendukung 43 SKPD	1,032,986,785.00
28	Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik	8100 dokumen elektronik 1 paket aplikasi takah	201,000,000.00
29	Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Propinsi Riau	56 Orang	173,543,937.00
30	Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	60 Orang	150,000,000.00
31	Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	30 orang	45,225,000.00
32	Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan	30 orang	45,225,000.00

				33	Penyusunan Dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara	0	1,000,000.00
				34	Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan	1 Dokumen 12 Kabupaten Kota	136,318,077.00
				35	Monitoring, Evaluasi Dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi	1 Dokumen	180,298,377.00
				36	Pengadaan Modul Pembelajaran	20 modul	150,750,000.00
4	1.4 Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN			401 orang	7,515,013,200.00
				1	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara	28 Orang Tubel 4 Orang Cost Sharing	3,537,900,000.00
				2	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM I)	2 Orang	128,209,000.00
				3	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM II)	14 Orang	1,255,662,000.00
				4	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM III)	40 orang / 93 hari	964,378,400.00
				5	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM IV)	35 orang / 97 hari	796,704,800.00
				6	Seleksi Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)	100 orang	126,685,000.00
				7	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	98 orang/ 31 hari/ 3 kelas	704,474,000.00
				8	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	100 orang / 7 hari / 3 kelas	1,000,000.00
5	1.5 Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Presentase aparatur sipil negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR			85%	885,056,711.00
				1	Orientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti	48 orang	497,199,857.00
				2	Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS	80 orang	121,275,500.00
				3	Pengelolaan Pensiun PNS	300 orang	265,581,354.00
				4	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	7912 orang	1,000,000.00
6	1.6 Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	Presentase penyelesaian pelayanan adminitrasi aparatur sipil negara	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA			84%	2,550,497,017.00
				1	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	1100 PNS Pindah	176,573,000.00
				2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi	2500 Orang	550,353,000.00
				3	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah	25 Orang	112,829,700.00

				4	Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	2000 orang	487,670,000.00
				5	Pengelolaan Administrasi Izin Belajar	1 Kegiatan	45,695,350.00
				6	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan	81,957,167.00
				7	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik	150 KPE 43 SKPD	110,000,000.00
				8	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	1 Kegiatan	183,593,950.00
				9	Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau	1 tahun	90,450,000.00
				10	Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi	SK 2000 pejabat	320,000,000.00
				11	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya Dan	1 Dokumen	1,000,000.00
				12	Pengelolaan Data Kepegawaian	5 Dokumen 490 Data PNS	119,273,400.00
				13	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi	2000 PNS	71,619,000.00
				14	Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau	70 halaman artikel/berita 1 Dokumen	102,700,950.00
				15	Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan	1 Dokumen	96,781,500.00
7	1.7 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			10%	520,701,624.00
				1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	61,286,398.00
				2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	54,819,731.00
				3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	53,507,696.00
				4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	54,379,248.00
				5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5 Set Dokumen	141,879,153.00
				6	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4 Dokumen	51,918,200.00
				7	Pelaporan Barang Milik Daerah	10 dokumen	50,641,648.00
				8	Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1 Set Dokumen Renstra	52,269,550.00
8	1.8 Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			20%	5,482,629,031.13

				1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	3 Paket Fisik, 2 Jasa Konsultan	624,455,800.00	
				2	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	52 Kali Service , 17 Liter Air Radiator , 75 Liter Oli, 20 Buah Peralatan genset, 40 Buah Kunci, 55 Buah Engsel Pintu, 2Set Pipa Air, 5 Buah Baut	101,859,000.00	
				3	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.939 kali service peralatan,185 buah komponen AC, 40 unit bongkar pasang AC	355,150,000.00	
				4	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	1 Paket Rehabilitasi, 2 Jasa Konsultasi	4,401,164,231.13	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							48%	5,550,536,865.00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.159 Lembar, 156 Paket Pengiriman	48,356,275.00	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Tahun	960,592,476.00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan	10 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	412,578,878.00	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24 Orang Petugas Kebersihan, 2 Orang Pengawas Kebersihan, 6 Orang Petugas Kebun Harian, 12 Bulan Pengambilan Sampah	1,175,448,000.00	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Gulung, 670 Rim, 473 Buah, 20 Tube, 40 Roll, 37 Set, 237 Dus, 24 Box, 22 Lusin, 12 Kotak, 40 Unit, 10 Botol	213,631,725.00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	860 blok,385 rim,7645 bh,190 pax,800 dus,40 buku,100 set	196,000,000.00	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1002 Buah, 15 Roll	85,215,000.00	
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.488 Exp Surat Kabar, 140 Buku	159,951,200.00	
					Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.396 orang kali	234,150,000.00	
					Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	73 orang hari dalam daerah, 54 orang hari luar daerah	852,781,582.00	

				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	16 Org penjaga keamanan, 1 org pegawai keamanan, 3 org front office, 1 paket atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan, 3 unit loker keamanan	871,692,729.00
				Pameran Pembangunan (Riau Expo)	1 kegiatan pameran Riau Expo	151,500,000.00
				Rapat Koordinasi BKP2D Se-Provinsi Riau	1 Dokumen hasil rapat koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau	188,639,000.00

C. Lokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan (Gaji Pegawai) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam table berikut ini :

Tabel 3.2. Alokasi Keuangan BKPPD Provinsi Riau Tahun 2016

No.	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 24.739.551.968,00	36%
2	Belanja Langsung	Rp. 44.459.531.051,13	64%
	TOTAL	Rp.69.199.083.019,13	100 %

Adapun rincian dari belanja langsung dapat dilihat dari perprogram sebagai berikut :

Tabel 3. 3. Alokasi Keuangan Belanja Langsung BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016

No	Program	Pagu	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp5.550.536.865,00	8 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.5.482.629.031,13	8%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.1.686.730.938,00	2 %
4	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp.7.863.227.553,00	11 %

No	Program	Pagu	Persentase (%)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 520.701.624,00	1 %
6	Program Pendidikan Kedinasan	Rp.7.515.013.200,00	11 %
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.12.405.138.112,00	18 %
8	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Rp. 2.550.497.017,00	4 %
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Rp. 885.056.711,00	1 %
	TOTAL	Rp.44.459.531.051.13	64 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau 2015 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;

B. Saran

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.